



## DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

### ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA: EVALUASI 38 PROVINSI DALAM ERA DESENTRALISASI

Nadofah<sup>1</sup>, M. Jaenudin<sup>2</sup>, Anisa Fitria Utami<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa  
Timur

\*Email Corresponding: [nadofah.febis@upnjatim.ac.id](mailto:nadofah.febis@upnjatim.ac.id)

#### ARTICLE INFORMATION

##### Article history:

Received date: 17 Maret 2025

Revised date: 1 April 2025

Accepted date: 22 April 2025

#### ABSTRACT

*This study aims to explore the level of fiscal independence across all provinces in Indonesia to provide a broader overview of the patterns and trends of fiscal dependence on the central government. A quantitative approach was employed by analyzing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) data from 38 provinces in Indonesia for the year 2024. The data were obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance and analyzed using indicators of fiscal independence, fiscal dependence, and the degree of fiscal decentralization. The results indicate significant disparities among provinces. Provinces in Java and Sumatra exhibit high fiscal independence with well-developed decentralization, whereas provinces in Maluku, Papua, and most of eastern Indonesia remain highly dependent on central government funds. Meanwhile, Sulawesi, Kalimantan, and Bali-Nusa Tenggara are in a transitional phase, with varying levels of fiscal independence and dependence. These disparities suggest that most provinces still face challenges in enhancing their fiscal capacity. Therefore, more adaptive fiscal policies are needed to promote regional fiscal independence more equitably.*

**Keyword:** Fiscal independence, fiscal dependence, fiscal decentralization, APBD, fiscal disparities.

#### ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kemandirian fiskal di seluruh provinsi di Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola dan tren ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menganalisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan dianalisis menggunakan indikator kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, serta derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antarprovinsi. Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatra memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan desentralisasi yang baik, sementara provinsi di Maluku, Papua, dan sebagian besar wilayah timur Indonesia masih sangat bergantung pada dana pusat. Adapun Sulawesi, Kalimantan, serta Bali-Nusa Tenggara berada dalam kondisi transisi dengan variasi tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar provinsi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif guna mendorong kemandirian daerah secara lebih merata.

**Kata Kunci:** Kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, desentralisasi fiskal, APBD, ketimpangan fiskal.

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan proses pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (Handayani et al., 2019). Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada keluwesan sistem ketatanegaraan serta kuatnya dukungan di tingkat daerah (Sturm, 2019). Hal ini dikarenakan konsep desentralisasi bersifat multidimensi dan mencakup berbagai bentuk desentralisasi, termasuk federalisme, devolusi, serta otonomi non-politik (Ladner et al., 2019; Sturm, 2019). Oleh karena itu, keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat menjadi faktor krusial yang memerlukan pendekatan berbasis teori dalam pengukurannya (Ladner et al., 2019).

Dalam praktiknya, implementasi otonomi daerah menghadapi berbagai tantangan di berbagai negara, terutama dalam aspek perencanaan, hubungan antar kelompok, dan dinamika politik. Di Kalimantan Barat, Indonesia, penerapan otonomi daerah dalam sektor pendidikan masih terkendala oleh ketidaksepahaman dalam visi dan misi pembangunan serta minimnya perhatian terhadap perencanaan Pendidikan (Handayani et al., 2019). Sementara itu, di Aceh, Québec, dan Skotlandia, interaksi antara kelompok mayoritas regional dengan minoritas ‘tingkat kedua’ menunjukkan perlunya peninjauan kembali konsep otonomi teritorial agar lebih mampu mengakomodasi hak-hak minoritas dan mendukung multikulturalisme lokal (Barter, 2018). Di Galicia, Spanyol, penerapan otonomi daerah telah membawa perubahan dalam politik regional, yang berdampak pada identitas kawasan, tuntutan otonomi, serta strategi mobilisasi dan ideologi partai-partai regionalis (Schrijver, 2005). Berbagai tantangan ini menunjukkan bahwa efektivitas otonomi daerah sangat bergantung pada kejelasan perencanaan, keselarasan kebijakan, serta kemampuan pemerintah dalam mengelola keberagaman sosial dan politik.

Era desentralisasi di Indonesia dimulai dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kebijakan ini memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu era desentralisasi menandai perubahan besar dalam sistem pemerintahan dengan tujuan memperkuat otonomi

daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong efisiensi ekonomi (Polishchuk, 2018).

Desentralisasi fiskal memiliki peran penting dalam mendukung otonomi daerah sebagai alat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing wilayah (Christia & Ispriyarso, 2019). Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melalui analisis rasio-rasio keuangan (Nakamnanu, 2024). Di Afrika penerapan desentralisasi fiskal yang diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital telah meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat kapasitas tata kelola pemerintah lokal (Monkam & Mangwanya, 2024). Selain itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika didukung oleh stabilitas makroekonomi dan struktur kelembagaan yang kuat (Arif & Ahmad, 2020).

Tidak hanya dalam aspek ekonomi, desentralisasi fiskal juga berpengaruh pada tata kelola lingkungan. Pemerintah daerah yang aktif dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan cenderung lebih efisien dalam mengelola lingkungan di tingkat lokal (Xu, 2022). Hal ini terlihat di Tiongkok, di mana desentralisasi fiskal telah membantu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik (Chen et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi juga pada kapasitas daerah dalam mengelola keuangan, stabilitas ekonomi, serta kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Desentralisasi fiskal yang efektif seharusnya mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dengan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan, daerah diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Ketika PAD meningkat, ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berkurang, sehingga daerah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, setelah lebih dari dua dekade implementasi, potret kemandirian fiskal di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Banyak daerah di Indonesia, seperti Maluku dan Kalimantan Utara, masih bergantung secara fiskal pada pemerintah pusat. Di Maluku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang

bagian kecil dari total pendapatan daerah, sehingga pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (Digdowiseiso et al., 2023; Pattilouw, 2023) Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Utara, di mana sebagian besar anggaran daerah berasal dari dana transfer pusat, mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal di wilayah tersebut (Digdowiseiso et al., 2023). Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 28.76%, sementara dana transfer mencapai 65.71% sedangkan pendapatan lainnya memberikan kontribusi sebesar 5,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat redah.

Ketergantungan fiskal yang tinggi ini berimplikasi pada rendahnya fleksibilitas daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta dapat menghambat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat menghambat kemandirian daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam menganalisis kemandirian fiskal di seluruh provinsi di Indonesia secara komprehensif. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung berfokus pada daerah tertentu, penelitian ini mengeksplorasi tingkat kemandirian fiskal di seluruh provinsi untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pola dan tren ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi desentralisasi fiskal yang lebih efektif guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Data APBD diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan pembaruan terakhir pada 4 Juli 2024. Untuk analisis data dilakukan dengan menghitung beberapa indikator diantaranya adalah:

### 1. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah Pendapatan Transfer dan Pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian fiskal, semakin mandiri daerah dalam membiayai kebutuhannya. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer dan pinjaman. Adapun rumus penghitungan rasio kemandirian fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Adapun untuk menilai tingkat kemandirian, digunakan kriteria sebagaimana tercantum pada table berikut:

**Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 -25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2012)

### 2. Derajat Ketergantungan

Rasio derajat ketergantungan fiskal dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan fiskal, semakin besar ketergantungan daerah pada transfer pusat. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah mencerminkan kemandirian dan pengelolaan fiskal yang lebih baik. Adapun rumus penghitungan rasio derajat ketergantungan fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun untuk menilai tingkat ketergantungan, digunakan kriteria sebagaimana tercantum pada table berikut:

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: (Banga, 2017)

3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, semakin mandiri daerah dalam keuangan. Sebaliknya, derajat yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Adapun rumus penghitungan derajat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun untuk menilai tingkat desentralisasi fiskal, digunakan kriteria sebagaimana tercantum pada table berikut:

**Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Hanafi, 2009)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Tabel 1. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
		Rasio	Kategori	Rasio	Kategori	Rasio	Kategori
1	Provinsi Aceh	37.66	Konsultatif	72.63	Sangat Tinggi	27.35	Sedang
2	Provinsi Sumatera Utara	159.17	Delegatif	38.52	Cukup	61.31	Sangat Baik
3	Provinsi Sumatera Barat	90.35	Delegatif	52.40	Sangat Tinggi	47.34	Baik
4	Provinsi Riau	147.08	Delegatif	40.44	Tinggi	59.48	Sangat Baik
5	Provinsi Jambi	91.00	Delegatif	52.07	Sangat Tinggi	47.39	Baik
6	Provinsi Sumatera Selatan	85.21	Delegatif	53.97	Sangat Tinggi	45.99	Baik
7	Provinsi Bengkulu	52.41	Partisipatif	65.59	Sangat Tinggi	34.37	Cukup
8	Provinsi Lampung	145.54	Delegatif	40.66	Tinggi	59.17	Sangat Baik
9	Provinsi Kepulauan Riau	73.95	Partisipatif	57.47	Sangat Tinggi	42.50	Baik
10	Provinsi Bangka Belitung	75.07	Delegatif	57.12	Sangat Tinggi	42.88	Baik

Source : Data diolah, 2025

Berdasarkan table 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di provinsi Pulau Sumatera tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal antarprovinsi. Beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Lampung, memiliki kemandirian fiskal yang tinggi. Tingginya rasio ini menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

Sebagai negara kepulauan yang membentang seluas 1,9 juta km<sup>2</sup> dan terdiri dari 38 provinsi dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola keuangan daerah di era desentralisasi. Luasnya wilayah ini menciptakan ketimpangan fiskal antarprovinsi, di mana daerah yang kaya akan sumber daya alam cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar, sedangkan wilayah terpencil dengan akses ekonomi terbatas lebih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan daerah menggunakan pendekatan berbasis wilayah, yang mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap perbedaan karakteristik ekonomi dan fiskal di setiap kelompok provinsi. Dengan metode ini, evaluasi terhadap tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, serta efektivitas desentralisasi keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih spesifik. Hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran guna mengurangi ketimpangan pembangunan dan mendorong kemandirian fiskal di seluruh Indonesia.

Berikut adalah hasil analisis kinerja keuangan daerah 38 provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan berbasis wilayah:

**1. Sumatera**

besar, sehingga lebih mampu membiayai kebutuhan daerah secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketiga provinsi ini masuk dalam kategori Delegatif, yang menandakan bahwa mereka memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan pemerintahan secara otonom.

Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Riau menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih rendah,

dengan Bengkulu dan Kepulauan Riau masuk dalam kategori Partisipatif. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD provinsi tersebut masih terbatas dan belum cukup untuk membiayai pengeluaran daerah secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Aceh, misalnya, memiliki tingkat ketergantungan fiskal tertinggi di Sumatera, dengan 72,63% pendapatannya berasal dari transfer pusat, yang sebagian besar didukung oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus), sehingga kontribusi PAD dalam keuangan daerahnya masih kecil.

Dari segi desentralisasi fiskal, provinsi dengan tingkat desentralisasi tertinggi adalah Sumatera Utara (61,31%), Riau (59,48%), dan Lampung (59,17%), yang masuk dalam kategori Sangat Baik. Artinya, lebih dari setengah pendapatan daerah mereka bersumber dari PAD, mencerminkan potensi ekonomi yang kuat dari sektor industri, perdagangan, dan perkebunan. Sebaliknya, Aceh (27,35%) dan Bengkulu (34,37%) masih masuk dalam kategori Sedang dan Cukup, yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mereka masih relatif kecil.

Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, provinsi-provinsi di Pulau Jawa umumnya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berdasarkan

Tabel 2, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali DI Yogyakarta, memiliki rasio kemandirian fiskal yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kemampuan mereka dalam membiayai sebagian besar pengeluaran daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan ekonomi yang lebih maju dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat memiliki kemandirian fiskal lebih tinggi, sedangkan provinsi yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional atau memiliki keterbatasan infrastruktur masih sangat mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

## 2. Jawa

Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, provinsi-provinsi di Pulau Jawa umumnya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berdasarkan Tabel 2, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa, kecuali DI Yogyakarta, memiliki rasio kemandirian fiskal yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kemampuan mereka dalam membiayai sebagian besar pengeluaran daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan ekonomi yang lebih maju dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

**Tabel 2. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Jawa Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
1	Provinsi DKI Jakarta	211.83	Delegatif	26.68	Sedang	72.33	Sangat Baik
2	Provinsi Jawa Barat	235.53	Delegatif	29.78	Sedang	70.14	Sangat Baik
3	Provinsi Jawa Tengah	212.02	Delegatif	32.02	Cukup	67.89	Sangat Baik
4	Provinsi DI Yogyakarta	64.64	Partisipatif	60.66	Sangat Tinggi	39.21	Cukup
5	Provinsi Jawa Timur	185.44	Delegatif	35.00	Cukup	64.91	Sangat Baik
6	Provinsi Banten	282.20	Delegatif	26.15	Sedang	73.80	Sangat Baik

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, provinsi-provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan mayoritas masuk dalam kategori Delegatif, kecuali DI Yogyakarta yang masih berada dalam kategori Partisipatif. Provinsi Banten (282,20), Jawa Barat (235,53), dan Jawa Tengah (212,02), mencatat dengan kemandirian fiskal tertinggi di Pulau Jawa, hal ini menunjukkan bahwa provinsi tersebut mampu membiayai pengeluaran daerah secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagian besar sumber utama pendapatan provinsi-provinsi ini berasal dari sektor industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat di Pulau Jawa. Sebaliknya, DI Yogyakarta

(64,64) memiliki tingkat kemandirian fiskal lebih rendah, mencerminkan ketergantungan yang lebih besar pada dana transfer pusat akibat keterbatasan sektor industri dan dominasi sektor pendidikan serta pariwisata dalam struktur ekonominya.

Dari segi ketergantungan fiskal, Banten (26,15%), DKI Jakarta (26,68%), dan Jawa Barat (29,78%) memiliki tingkat ketergantungan yang rendah, menandakan bahwa pendapatan daerah mereka tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, berkat kapasitas fiskal yang kuat dan sektor ekonomi yang berkembang pesat. Sementara itu, Jawa Tengah (32,02%) dan Jawa Timur (35,00%) masih masuk dalam kategori

"Cukup" yang menunjukkan bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup besar, dana transfer pusat tetap berperan dalam struktur anggaran mereka. DI Yogyakarta (60,66%) memiliki tingkat ketergantungan tertinggi, dengan lebih dari setengah pendapatannya berasal dari transfer pusat, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor unggulan.

Dalam aspek derajat desentralisasi fiskal, hamper seluruh provinsi di Pulau Jawa menunjukkan tingkat desentralisasi yang sangat baik, di mana PAD berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan dan belanja daerah. Hal ini mencerminkan keberhasilan desentralisasi fiskal di wilayah tersebut, dengan kapasitas pengelolaan keuangan yang mandiri. Sebaliknya, DI Yogyakarta (39,21%) memiliki tingkat desentralisasi fiskal terendah di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa PAD

masih terbatas dalam menopang anggaran daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat tetap tinggi.

### 3. Kalimantan

Wilayah Pulau Kalimantan memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor sumber daya alam, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri ekstraktif lainnya. Hal ini berpengaruh pada kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal di setiap provinsinya. Berdasarkan Tabel 3, terdapat variasi dalam tingkat kemandirian fiskal antarprovinsi di Kalimantan, dengan beberapa provinsi memiliki rasio kemandirian yang cukup tinggi, sementara yang lain masih menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap transfer pemerintah pusat.

**Tabel 3. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
1	Provinsi Kalimantan Barat	108.44	Delegatif	47.96	Tinggi	52.00	Sangat Baik
2	Provinsi Kalimantan Tengah	54.25	Partisipatif	64.82	Sangat Tinggi	35.17	Cukup
3	Provinsi Kalimantan Selatan	76.94	Delegatif	56.43	Sangat Tinggi	43.42	Baik
4	Provinsi Kalimantan Timur	102.78	Delegatif	47.71	Tinggi	49.04	Baik
5	Provinsi Kalimantan Utara	52.28	Partisipatif	65.66	Sangat Tinggi	34.33	Cukup

Sumber : Data diolah, 2025

Dari sisi kemandirian fiskal menunjukkan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan Tingkat kemandirian tertinggi di Pulau Kalimantan dengan kategori Delegatif, yang artinya provinsi tersebut memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai belanja daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara termasuk dalam kategori Partisipatif, yang menandakan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan utama dalam struktur keuangan daerah mereka.

Pada analisis ketergantungan fiskal, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi, di mana lebih dari setengah pendapatan daerahnya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan sektor ekonomi lokal dalam menghasilkan PAD yang besar serta kondisi infrastruktur yang masih berkembang. Sementara itu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menunjukkan ketergantungan

yang lebih rendah, meskipun masih tergolong "Tinggi", yang menunjukkan bahwa meskipun PAD mereka cukup kuat, dana transfer dari pusat masih berperan signifikan dalam struktur keuangan daerah.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi dan masuk dalam kategori "Sangat Baik", yang mencerminkan kontribusi PAD yang signifikan dalam struktur pendapatan daerah. Sementara itu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berada dalam kategori "Baik", yang menunjukkan bahwa PAD mereka sudah cukup berperan dalam pembiayaan daerah. Sebaliknya, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara memiliki tingkat desentralisasi yang lebih rendah, menandakan bahwa PAD mereka masih terbatas dalam mendukung kebutuhan pembangunan, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi.

### 4. Sulawesi

Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi menunjukkan variasi dalam tingkat kemandirian fiskal. Tabel 4 menunjukkan perbedaan rasio kemandirian, ketergantungan fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal cukup signifikan di wilayah ini,

mencerminkan kondisi ekonomi yang beragam serta perbedaan dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur keuangan masing-masing provinsi.

**Tabel 4. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
1	Provinsi Sulawesi Utara	71.67	Partisipatif	58.24	Sangat Tinggi	41.74	Baik
2	Provinsi Sulawesi Tengah	66.72	Partisipatif	59.95	Sangat Tinggi	40.00	Cukup
3	Provinsi Sulawesi Selatan	119.82	Delegatif	45.45	Tinggi	54.45	Sangat Baik
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	56.31	Partisipatif	63.97	Sangat Tinggi	36.02	Cukup
5	Provinsi Sulawesi Barat	37.30	Konsultatif	72.78	Sangat Tinggi	27.15	Sedang
6	Provinsi Gorontalo	282.20	Delegatif	26.15	Sedang	73.80	Sangat Baik

Source : Data diolah, 2025

Dalam hal kemandirian fiskal, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan memiliki tingkat kemandirian tertinggi dengan kategori Delegatif, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki kapasitas fiskal yang kuat dengan kontribusi PAD yang signifikan dalam membiayai pengeluaran daerah. Di sisi lain, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara masih berada dalam kategori Partisipatif, menandakan bahwa meskipun PAD cukup berkontribusi dalam struktur APBD, namun ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi. Adapun Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan tingkat kemandirian paling rendah dan termasuk dalam kategori Konsultatif, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang sangat rendah, dengan mayoritas pendapatan daerahnya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Sebagian besar provinsi di Sulawesi masih sangat bergantung pada transfer dana pusat, terutama Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara di mana lebih dari separuh pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh keterbatasan sektor ekonomiyangdapat menghasilkan PAD dalam jumlah besar serta infrastruktur dan investasi yang masih minim. Sementara itu, Gorontalo memiliki tingkat ketergantungan fiskal lebih rendah dalam ategori Sedang, yang mencerminkan kemampuan

provinsi ini dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya.

Gorontalo dan Sulawesi Selatan memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi, menandakan kemampuan yang kuat dalam membiayai pengeluaran daerah melalui PAD. Sulawesi Utara masuk dalam kategori Baik, yang menunjukkan kontribusi PAD yang cukup signifikan meskipun masih membutuhkan dana transfer dari pusat. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tergolong Cukup, mencerminkan bahwa PAD belum menjadi sumber utama pendanaan daerah. Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan tingkat desentralisasi fiskal terendah di wilayah ini dengan kategori Sedang, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang masih terbatas dalam mendukung pembangunan daerah.

### 5. Bali dan Nusa Tenggara

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki karakteristik ekonomi yang khas. Bali berperan sebagai pusat pariwisata internasional, sedangkan perekonomian NTB dan NTT lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Struktur ekonomi ini memengaruhi tingkat kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan desentralisasi fiskal di masing-masing provinsi.

**Tabel 5. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
1	Provinsi Bali	179.17	Delegatif	35.79	Cukup	64.12	Sangat Baik
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	100.77	Delegatif	49.81	Tinggi	50.19	Sangat Baik
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	52.33	Partisipatif	65.61	Sangat Tinggi	34.34	Cukup

Source : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, Provinsi Bali memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi dan masuk dalam kategori Delegatif, hal ini mencerminkan kemampuannya dalam membiayai sebagian besar belanja daerah melalui PAD, terutama dari sektor pariwisata. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga masuk kategori yang sama, menunjukkan pendapatan daerah yang cukup kuat meskipun masih bergantung pada transfer pusat. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kemandirian fiskal lebih rendah yakni sebesar 52,33% yang menandakan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana pusat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan tingkat ketergantungan fiskal tertinggi yakni sebesar 65,61% yang menunjukkan lebih dari setengah pendapatannya masih berasal dari transfer pusat. Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dalam kategori Tinggi, yang menandakan bahwa meskipun PAD cukup kuat, transfer pusat tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah. Sementara itu, Provinsi Bali memiliki ketergantungan fiskal lebih rendah yakni sebesar

35,79% atau dalam kategori Cukup, yang mencerminkan kemampuannya dalam mengurangi ketergantungan pada dana pusat berkat kontribusi PAD yang signifikan.

Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi, dan masuk dalam kategori Sangat Baik, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk membiayai pengeluaran daerah secara mandiri. Sebaliknya, Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori Cukup, yang menandakan bahwa kontribusi PAD masih terbatas, sehingga ketergantungan pada transfer pusat tetap tinggi.

## 6. Maluku dan Papua

Wilayah Maluku dan Papua memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Luas wilayah yang besar, infrastruktur yang masih terbatas, serta populasi yang tersebar menjadi tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah

**Tabel 6. Tingkat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal Provinsi di Wilayah Pulau Maluku dan Papua Tahun 2024**

No	Wilayah	Rasio Kemandirian		Derajat Ketergantungan		Derajat Desentralisasi	
1	Provinsi Maluku	31.02	Konsultatif	76.31	Sangat Tinggi	23.67	Sedang
2	Provinsi Papua	26.02	Konsultatif	79.32	Sangat Tinggi	20.64	Sedang
3	Provinsi Maluku Utara	31.27	Konsultatif	75.33	Sangat Tinggi	23.55	Sedang
4	Provinsi Papua Barat	13.33	Instruktif	88.20	Sangat Tinggi	11.76	Kurang
5	Provinsi Papua Selatan	9.74	Instruktif	89.87	Sangat Tinggi	8.75	Sangat Kurang
6	Provinsi Papua Tengah	19.82	Instruktif	62.62	Sangat Tinggi	12.41	Kurang
7	Provinsi Papua Pegunungan	8.37	Instruktif	90.62	Sangat Tinggi	7.58	Sangat Kurang
8	Provinsi Papua Barat Daya	8.88	Instruktif	90.43	Sangat Tinggi	8.03	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, 2025

Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua menjadi provinsi termasuk dalam kategori Konsultatif dalam hal kemandirian fiskal, yang mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat untuk membiayai pengeluaran daerah. Sementara itu, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya masuk dalam kategori Instruktif, menunjukkan bahwa PAD mereka masih sangat rendah, sehingga hampir seluruh pendanaan daerah bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Seluruh provinsi di Maluku dan Papua memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi. Beberapa provinsi seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan bahkan memiliki Tingkat ketergantungan lebih dari 90%.

Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan daerah berasal dari dana transfer pusat, baik melalui DAU, DAK, maupun Dana Otsus. Tingginya ketergantungan ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan fiskal secara mandiri.

Derajat desentralisasi fiskal di provinsi-provinsi Maluku dan Papua relatif rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua masuk dalam kategori Sedang, sementara Papua Barat dan Papua Tengah berada di kategori Kurang. Adapun Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan, tergolong Sangat Kurang. Ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, sehingga pembangunan masih sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat.

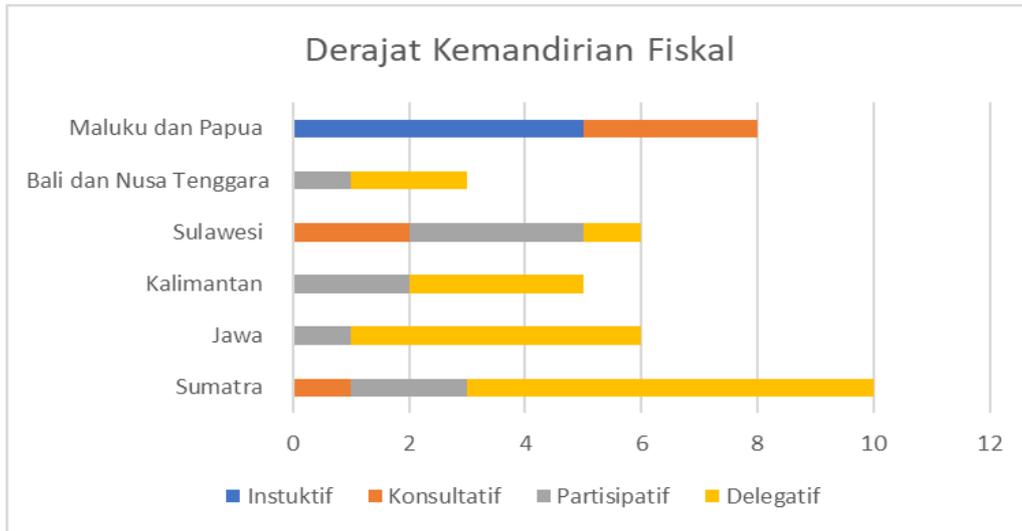
## PEMBAHASAN

### 1. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada

transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer dan pinjaman.

Gambar 1. Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah, 2025

Dari total 38 provinsi yang dianalisis, sebanyak 18 Provinsi atau sekitar 47% masuk dalam kategori Delekatif, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola keuangan daerahnya. Sementara itu, 9 provinsi atau 24% provinsi berada dalam kategori Partisipatif, di mana mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan fiskal, tetapi masih bergantung pada pemerintah pusat dalam beberapa aspek. Daerah yang termasuk dalam kategori konsultatif sebanyak 6 provinsi atau sebanyak 16% provinsi, yang berarti bahwa meskipun daerah-daerah ini memiliki kewenangan dalam kebijakan fiskal, mereka tetap harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Sisanya, yaitu sebanyak 5 provinsi atau 13% provinsi berada dalam kategori Instruktif, yang menandakan bahwa daerah-daerah tersebut masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil visualisasi kemandirian fiskal pada gambar 1 menunjukkan adanya kesenjangan fiskal antarwilayah di Indonesia, yakni wilayah Sumatra dan Jawa memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi dengan dominasi kategori Delekatif dan Partisipatif, hal ini menandakan bahwa sebagian besar provinsi di kedua wilayah tersebut telah mampu membiayai kebutuhannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat.

Kalimantan dan Sulawesi berada dalam tahap transisi, dengan kombinasi kategori

Konsultatif, Partisipatif, dan Delekatif, yang menunjukkan bahwa beberapa daerah telah mencapai kemandirian fiskal, sementara yang lain masih memerlukan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Sebaliknya, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah, ditandai dengan dominasi kategori Instruktif dan Konsultatif, yang mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat akibat keterbatasan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Grafik kemandirian fiskal menunjukkan tantangan dalam kemandirian fiskal di Indonesia, di mana daerah di bagian barat cenderung lebih mandiri dibandingkan dengan daerah di bagian timur. Daerah terpencil seperti di wilayah Indonesia timur sering menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses jalan yang kurang memadai, menghambat aktivitas ekonomi dan peluang investasi (Habibi, 2024). Rendahnya investasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta faktor demografi dan tingkat pendidikan turut memperburuk disparitas pendapatan antar daerah (Frisnoiry et al., 2024).

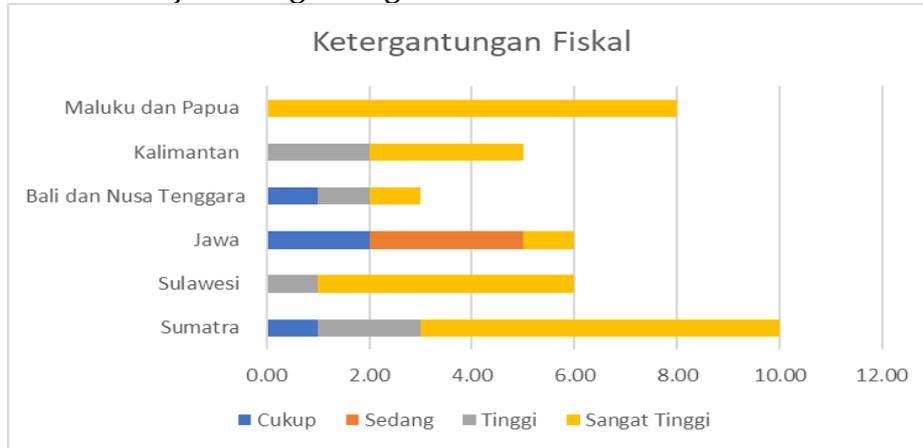
Meskipun dana alokasi umum bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan fiskal antar daerah, kebijakan ini belum berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan tersebut secara keseluruhan (Akita et al., 2021). Provinsi-provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang

melimpah, seperti di Kalimantan, Sumatra, dan Papua, memiliki penerimaan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam signifikan. Namun, sebagian besar pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam masih masuk ke pemerintah pusat, sehingga daerah penghasil tetap bergantung pada transfer fiskal untuk membiayai belanja daerahnya.

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer, yang menandakan rendahnya kemandirian fiskal.

## 2. Rasio Ketergantungan Fiskal

Gambar 2. Derajat Ketergantungan Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data diolah, 2025

Tingkat ketergantungan fiskal pada gambar 2 di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Dari total 38 daerah yang dianalisis, sebanyak 25 daerah atau sekitar 66% tergolong dalam kategori Sangat Tinggi, yang mengindikasikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi sumber utama dalam menjalankan fungsi keuangan mereka. Kategori ini paling banyak ditemukan di wilayah Sumatra, Sulawesi, serta Maluku-Papua. Sementara itu, sebanyak 6 daerah atau sekitar 16% masuk dalam kategori Tinggi, yang berarti bahwa meskipun masih bergantung pada pemerintah pusat, daerah-daerah ini mulai memiliki sedikit keleluasaan dalam mengelola keuangan mereka sendiri.

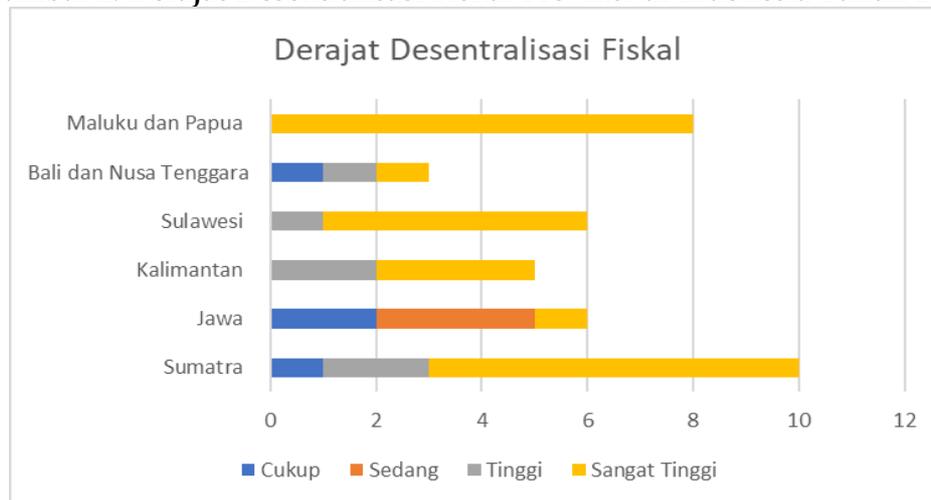
Wilayah Maluku, Papua, dan Sumatra memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, menandakan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta aktivitas ekonomi yang belum berkembang secara optimal, sehingga daerah-daerah tersebut belum mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri.

Pulau Kalimantan dan Sulawesi umumnya masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, meskipun beberapa provinsi menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih baik. Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki variasi dalam ketergantungan fiskalnya, dengan beberapa provinsi masuk dalam kategori tinggi, sementara yang lain menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih moderat.

Di Pulau Jawa, tingkat ketergantungan fiskal relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Pulau Jawa memiliki rasio ketergantungan fiskal terendah, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki PAD yang kuat dan mampu membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri. Kondisi ini mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih tinggi, didukung oleh basis ekonomi yang kuat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.

## 3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal mencerminkan sejauh mana provinsi di Indonesia mampu membiayai kebutuhannya sendiri melalui pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat.

**Gambar 2. Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2024**

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data mengenai derajat desentralisasi fiskal di berbagai wilayah Indonesia, mayoritas daerah telah mencapai tingkat desentralisasi fiskal yang cukup baik. Dari 38 daerah yang dianalisis, sebanyak 12 daerah (32%) masuk dalam kategori Sangat Baik, mencerminkan kapasitas tinggi dalam mengelola keuangan secara mandiri. Selain itu, 8 daerah (21%) termasuk dalam kategori Baik, yang menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kewenangan fiskal yang cukup signifikan, meskipun masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek.

Sebanyak 7 daerah (18%) masuk dalam kategori Cukup, menunjukkan bahwa mereka telah mengalami perkembangan dalam otonomi fiskal, meskipun masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Sementara itu, 6 daerah (16%) tergolong dalam kategori Sedang, yang menandakan bahwa kapasitas mereka dalam mengelola keuangan daerah masih terbatas dan memerlukan lebih banyak dukungan.

Namun, masih terdapat daerah-daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal yang rendah, yaitu 5% atau 2 daerah masuk dalam kategori Kurang, serta 8% atau 3 daerah dalam kategori Sangat Kurang. Daerah-daerah ini masih memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan daerah dan sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Pada Gambar 3 dapat digambarkan bahwa provinsi-provinsi di Jawa memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi, menunjukkan kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pemerintahan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor utama yang mendukung hal ini adalah perekonomian yang lebih maju serta struktur pajak dan retribusi daerah yang lebih kuat, sehingga ketergantungan terhadap transfer dana dari

pemerintah pusat lebih rendah dibandingkan wilayah lain.

Sebaliknya, provinsi di Maluku, Papua, dan sebagian besar Nusa Tenggara memiliki derajat desentralisasi fiskal yang rendah, mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya basis ekonomi daerah serta minimnya sumber PAD.

Sementara itu, provinsi di Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan variasi dalam tingkat desentralisasi fiskal. Beberapa daerah telah mengalami peningkatan kemandirian fiskal, sementara yang lain masih dalam proses menuju desentralisasi yang lebih optimal. Kapasitas fiskal yang lebih baik umumnya ditemukan di wilayah dengan sektor industri dan pertambangan yang berkembang.

Kalimantan dan Sulawesi memiliki distribusi yang lebih merata antara kategori cukup, sedang, dan baik. Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan kecenderungan yang lebih bervariasi, dengan sebagian daerah mencapai kategori baik, namun masih ada yang berada dalam kategori kurang. Sementara itu, Maluku dan Papua memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang masih didominasi kategori sedang, kurang, dan sangat kurang, yang menunjukkan bahwa wilayah ini masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal terbukti dapat mengurangi ketimpangan pendapatan regional dengan memungkinkan pemerintah daerah merancang program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka dan menyediakan layanan publik secara efisien (Siburian, 2020). Dampak desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan vertikal dan horizontal dapat bergantung pada

berbagai faktor, termasuk kualitas kelembagaan dan tingkat modal sosial di suatu daerah (Digdowiseiso et al., 2020).

Pembuat kebijakan perlu memperhitungkan karakteristik khas setiap wilayah dalam merancang kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional, karena pendekatan yang seragam mungkin kurang efektif (Sofilda et al., 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan daerah provinsi di Indonesia maka dapat disimpulkan berdasarkan masing-masing kategori analisis, yakni:

1. Berdasarkan analisis tingkat kemandirian fiskal antarwilayah di Indonesia menunjukkan nilai yang bervariasi. Sumatra memiliki kemandirian tertinggi dengan dominasi kategori delegatif, sedangkan Jawa dan Kalimantan cukup mandiri dengan kombinasi partisipatif dan delegatif. Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Maluku-Papua masih bergantung pada dana pusat dengan dominasi kategori instruktif dan konsultatif, yang menandakan masih rendahnya kemandirian fiskal di wilayah tersebut.
2. Hasil analisis pada tingkat ketergantungan fiskal menunjukkan bahwa wilayah Sumatra dan Maluku-Papua memiliki ketergantungan fiskal sangat tinggi, sementara Sulawesi dan Kalimantan lebih beragam dengan sebagian provinsi masih sangat bergantung pada pusat. Jawa memiliki ketergantungan fiskal paling rendah, menandakan kapasitas fiskal yang lebih baik dibanding wilayah lain.
3. Berdasarkan hasil analisis pada tingkat derajat desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa wilayah Jawa dan Sumatra memiliki desentralisasi fiskal terbaik dengan banyak provinsi yang masuk dalam kategori baik dan sangat baik. Kalimantan dan Sulawesi berada di tingkat cukup hingga sedang, sementara Bali-Nusa Tenggara bervariasi. Maluku dan Papua masih memiliki tingkat desentralisasi fiskal terendah yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki Tingkat ketergantungan tinggi pada dana pusat.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kinerja keuangan daerah, menunjukkan bahwa adanya ketimpangan yang signifikan antarprovinsi di Indonesia. Jawa dan Sumatra memiliki kemandirian fiskal tertinggi dengan tingkat desentralisasi yang baik, sedangkan Maluku, Papua, dan sebagian wilayah timur Indonesia masih sangat bergantung pada dana pusat. Sulawesi, Kalimantan,

serta Bali-Nusa Tenggara berada dalam kondisi transisi dengan variasi tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adaptif untuk mendorong kemandirian daerah secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal Disparities in Indonesia in the Decentralization Era: Does General Allocation Fund Equalize Fiscal Revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1866. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Arif, U., & Ahmad, E. (2020). A Framework for Analyzing the Impact of Fiscal Decentralization on Macroeconomic Performance, Governance, and Economic Growth. *The Singapore Economic Review*, 65(01), 3–39. <https://doi.org/10.1142/S0217590818500194>
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Kosaep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Barter, S. J. (2018). Rethinking Territorial Autonomy. *Regional Studies*, 52(2), 298–309. <https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1366651>
- Chen, S., Liu, X., & Lu, C. (2022). Fiscal Decentralization, Local Government Behavior, and Macroeconomic Effects of Environmental Policy. *Sustainability*, 14(17), 11069. <https://doi.org/10.3390/su141711069>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Digdowiseiso, K., Sugiyanto, E., & Setiawan, H. D. (2020). Fiscal Decentralisation and Inequality in Indonesia. *Economy of Region*, 16(3), 989–1002. <https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-24>
- Digdowiseiso, K., W, N. P. L., & Andriani, F. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 127–137. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.556>
- Frisnoiry, S., Febrianti, D. A., Tambunan, E. E. B., & Tarigan, G. H. (2024). Problems of Income Disparity Based on the Gini Ratio in the Indonesian Economy. *Indonesian Journal of*

- Banking and Financial Technology*, 2(2), 125–138. <https://doi.org/10.55927/fintech.v2i2.8851>
- Habibi, M. (2024). Ketimpangan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 59–63. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1412>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Hanafi, I. D. (2009). *Desentralisasi fisik [ie fiskal]: kebijakan pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*. UB Press.
- Handayani, H., Abdullah, T., & Suryadi. (2019). Regional Autonomy in West Kalimantan: Implementation and Challenges Towards Education Development. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(6), 173–177.
- Ladner, A., Keuffer, N., Baldersheim, H., Hlepas, N., Swianiewicz, P., Steyvers, K., & Navarro, C. (2019). *What Is Local Autonomy?* (pp. 3–36). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-95642-8\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-95642-8_1)
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN.
- Monkam, N., & Mangwanya, M. G. (2024). Digital Tools for Boosting the Impact of Fiscal Decentralization in Africa's Local Economies. *F1000Research*, 13, 279. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143922.1>
- Nakamnanu, S. P. M. (2024). Fiscal Independence of the Regional Government of Kupang Regency in the Implementation of Regional Government Affairs. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(12), 3631–3650. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i12.7169>
- Pattilouw, D. R. (2023). Performance Analysis of Regional Original Income in Maluku Province and its Optimization Strategy. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(02), 83–99. <https://doi.org/10.58471/jecombi.v3i03.61>
- Polishchuk, L. I. (2018). Decentralization in Russia: Impact on Quality of Governance. In *Devolution and Development* (pp. 333–370). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351160001-19>
- Schrijver, F. (2005). Regionalism in Galicia After Regionalisation. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 96(3), 275–286. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2005.00459.x>
- Siburian, M. E. (2020). Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence From Indonesia. *Applied Economics Letters*, 27(17), 1383–1386. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1683139>
- Sofilda, E., Zilal Hamzah, M., & Kusairi, S. (2023). Analysis of Fiscal Decentralization, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2220520>
- Sturm, R. (2019). Developing Autonomy: Are There Alternatives to Secession? In *Regional Governance in the EU*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788978620.00013>
- Xu, M. (2022). Research on the Relationship Between Fiscal Decentralization and Environmental Management Efficiency Under Competitive Pressure: Evidence From China. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(16), 23392–23406. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17426-1>